

AUDIT MANAJEMEN TERHADAP PEMBELIAN DAN PENYALURAN PANGAN PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL NTB DI MATARAM

Endang Kartini

Arlin Yulianti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

ABSTRACT

Perum Bulog is one state that is engaged in the purchase and distribution of food, in conducting the purchase and distribution of food we need to hold audits or inspections of operational management and distribution of food purchases in order to assist management decisions to improve corporate performance in the future.

The study, entitled "Audit Management Purchasing And Distribution Of Food In Bulog NTB Regional Division" Aims to determine whether the implementation of the operational functions of the purchase and distribution of food has been done effectively or not, and provide input to BULOG by collecting, compiling, and analyzing data by focusing on an object at a specific time in which the study aims to describe the existing situation (level of efficiency and effectiveness that occurred).

In accordance with the purpose of the study, to determine the level of efficiency and effectiveness in the inspection is carried out analysis of the data of purchase and delivery and other matters related to the purchase and distribution, which will then be compared to the realization that there is a criterion then can be known "whether the purchase and distribution that occurred was done efficiently and effectively".

After analyzing the data of purchase, other things related to the purchase and distribution, and comparison with existing criteria both qualitatively and quantitatively in fact the results show that "the purchase and distribution occurring largely are not done efficiently and effectively"

Keywords: Audit Management, the function of purchase and distribution of food, procedure, Organization, ruler, report, form and document.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda perusahaan, prinsip efisiensi dan efektivitas mutlak dipegang teguh dan diterapkan. Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dipandang mutlak karena pada umumnya perusahaan menghadapi suasana keterbatasan dalam perolehan dana, daya, sarana dan prasarana kerja. Keterbatasan yang paling sering dirasakan dan dihadapi oleh perusahaan adalah dalam pengadaan dana, baik yang bersumber dan pemilik atau pendiri perusahaan maupun yang berasal dan sumber eksternal. Berdasarkan situasi tersebut maka tidak membenarkan alasan apapun yang mendorong terjadinya tindakan boros atau tidak efisien. Dalam suatu perusahaan bagian pembelian memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang kegiatan operasi perusahaan, karena aktivitas bagian ini merupakan aktivitas awal dan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Aktivitas pembelian adalah aktivitas yang harus dilaksanakan dalam perusahaan guna memperoleh bahan baku demi menunjang arus produksi, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk akhir dan sekaligus mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan bagian pembelian ini akan sangat membantu keberhasilan bagian yang lain. Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus selalu berusaha

untuk meningkatkan efektifitas perusahaan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melaksanakan audit manajemen.

Tidak sedikit praktisi manajemen bisnis yang berpendapat bahwa di dalam menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, pelaksana setiap satuan kerja operasional hendaknya memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan diperhatikannya prinsip ini maka apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. Demikian halnya dengan Perum (Bulog) Divisi Regional NTB, dimana kegiatan operasional dimulai dari kegiatan pembelian, penyimpanan, pengelolaan sampai dengan penyaluran. Sehingga setiap satuan kerja operasional diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif dan efisien.

Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan dan usaha lain. Sifat dari perusahaan tersebut adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Bulog Divisi Regional NTB – Mataram memiliki dua jenis usaha yaitu pembelian dan penyaluran. Kegiatan usahanya dimulai dari pengadaan atau pembelian gabah, penyimpanan, kemudian diolah untuk selanjutnya hasil olahan tersebut di pergunakan atau disimpan sebagai Cadangan Pangan Nasional yang akan disalurkan bagi kelompok masyarakat miskin (raskin), Rawan pangan, Golongan Anggaran Pasar Murni dan Bahan Baku Industri.

Dalam pelaksanaan operasi pembelian beras oleh Bulog masih adanya ketidaksesuaian kualitas produksi yang standar dimana seperti yang telah ditetapkan oleh Bulog itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah salah satunya Harga Pembelian Pedagang yang lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), disamping itu pula masih belum adanya standarisasi kemitraan penggilingan.

Dalam pelaksanaan operasi penyaluran pada Perum Bulog Divre NTB masih dikatakan belum efisien, misalkan dalam hal ketepatan waktu , di beberapa daerah distribusi dilakukan setiap bulan, kecuali untuk beberapa wilayah tertentu yang sulit dijangkau droping dilakukan dua bulan sekali atau tergantung situasi. Kendala pelaksanaan Raskin seperti kurangnya dukungan dana operasional terutama untuk pengangkutan dari titik distribusi ke penerima manfaat, jumlah beras lebih sedikit dari pada jumlah KK yang membutuhkan, maupun kondisi geografis wilayah dengan tingkat kesulitan yang berbeda menurut wilayah. Saran lain untuk lebih tepat sasaran adalah pendataan KK Miskin dilakukan oleh aparat paling rendah misalnya Ketua RT/RW yang dapat mengamati dan menilai tingkat kemiskinan warga mereka sekaligus ketetapan sasaran.

Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Sampai dengan Tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh RASKIN. Hal inilah yang menjadikan RASKIN sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan RASKIN selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indikator maupun ketersediaan anggaran. Sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu ketetapan atas jumlah beras raskin yang disediakan juga tidak selalu dilakukan pada awal tahun, dan sering dilakukan perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini

akan menyulitkan dalam perencanaan penyiapan stoknya, perencanaan pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya.

Data RTS yang dinamis menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di luar RTS yang belum dapat menerima RASKIN karena tidak tercatat sebagai RTS di BPS. Kebijakan lokal dan “keikhlasan” sesama RTM dalam berbagi, tidak jarang dipersalahkan sebagai ketidaktepatan sasaran. Dalam pelaksanaan penyaluran beras Raskin, perlu penegasan kembali bahwa Raskin bukan hanya program Perum Bulog tetapi menyangkut semua pihak. Perlu kerjasama dengan Pemda dan jajarannya. Untuk itu sosialisasi perlu terus dilanjutkan dan perlu transparansi terhadap masyarakat sehingga raskin dapat diketahui secara gamblang dan jelas. Tim penilai harus dibentuk pada level daerah dan harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah pelaksanaan fungsi pembelian dan penyaluran pangan pada Perum Bulog Divisi Regional NTB pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi operasional pembelian dan penyaluran pangan di Perum Bulog Divisi Regional NTB pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 telah berjalan efektif dan efisien atau belum.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Audit

Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing”, mendefinisikan auditing sebagai berikut : “Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan” (2002:9)

2.2 Definisi Manajemen

Menurut Dr. Sp. Siagian dalam buku “*filsafat administrasi*” management dapat didefinisikan sebagai “kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain”. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa management merupakan inti daripada administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama daripada administrasi.

2.3 Pengertian Audit Manajemen

Dalam bukunya Amin Widjadji Tunggal, salah satu definisi pemeriksaan manajemen menurut Alejendro.R.Gorospe/Lindberg/Lohn: Pemeriksaan Manajemen adalah suatu teknis yang secara teratur dan sistematis digunakan untuk menilai efektifitas atau pekerjaan dibandingkan dengan standar-standar perusahaan dan industri dengan menggunakan petugas yang bukan ahli dalam lingkup yang dianalisis, untuk menyakinkan manajemen bahwa tujuannya dilaksanakan dan ditemukan perbaikan yang diperlukan.

2.4 Standar Atau Kriteria Audit Manajemen

Dalam audit laporan keuangan historis, prinsip akuntansi yang diterima umum (di Indonesia menggunakan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan) merupakan kriteria umum untuk mengevaluasi penyajian yang wajar, sedangkan dalam audit manajemen

tidak ada kriteria standar seperti itu. Dalam menilai kinerja manajemen, hal utama yang diperlukan adalah mendefinisikan kriteria penilaian. Salah satu pendekatan untuk menyusun kriteria bagi audit manajemen adalah dengan menetapkan bahwa tujuannya adalah untuk menentukan apakah beberapa aspek unit perusahaan dapat dibuat lebih efektif atau efisien dan untuk merekomendasikan perbaikan-perbaikan. Kriteria yang lebih spesifik biasanya diperlukan sebelum audit manajemen dimulai.

2.5 Pengertian Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2000:12), pengertian ekonomis, efektifitas dan efisiensi adalah ekonomi berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan tercapai, dan efisiensi berhubungan dengan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa ekonomisasi adalah efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber-sumber ekonomis untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang. Pengertian efisiensi memperhatikan segi output (keluaran) maupun segi input (masukan). Dengan kata lain sesuatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika melaksanakan kegiatan tersebut telah mencapai sasaran, dengan pengorbanan biaya yang terendah. Atau sebaliknya dengan pengorbanan biaya yang minimal diperoleh hasil output yang diinginkan. Pengertian efektifitas berhubungan dengan hasil operasi yaitu menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan atau operasi berhasil mencapai sasaran yang diinginkan.

2.6 Pengendalian Intern

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

2.7 Fungsi Pembelian (Pengadaan)

Fungsi pembelian adalah fungsi manajemen utama dalam sistem manajemen pembelian dan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam kehidupan suatu perusahaan, dan seluruh aspek kegiatan pembelian harus terselenggara dengan tingkat efisiensi yang setinggi mungkin. Pembelian yang dilaksanakan secara efektif dan ekonomis sangat diperlukan dalam upaya mencapai kondisi perusahaan yang sehat, karena pembelian merupakan kegiatan yang memerlukan pengarahannya sumber daya dalam jumlah besar. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.

2.8 Fungsi Penyaluran (Saluran Distribusi)

Setiap kegiatan pemasaran memiliki fungsi, termasuk juga saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan suatu jalur perantara pemasaran baik transportasi maupun penyimpanan suatu produk barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Saluran distribusi dipengaruhi faktor di antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran yaitu wholesaler (distributor/agen) yang melayani pembeli retailer (peritel) dan juga retailer (peritel) yang mengecerkan produk kepada konsumen akhir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan

sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Rony S. Kountur, 2003:105).

3.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan antara lain:

1. Manajemen Pembelian dan Penyaluran Pangan
2. Prosedur
3. Badan Organisasi
4. Kebijakan
5. Laporan
6. Formulir dan Dokumen
7. Model Analisis Data

3.2 Alat Analisis Data

Adapun alat analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Fungsi Pembelian dan Penyaluran Pangan
2. Peraturan Kerja Unit Perum BULOG
3. Pengendalian Intern Fungsi Pembelian
4. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Fungsi Pembelian dab Penyaluran Pangan.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Sesuai dengan tahap pemeriksaan yang ditetapkan, maka sebelum berlanjut pada tahap selanjutnya terlebih dahulu ditentukan ruang lingkup pemeriksaan manajemen (Audit Manajemen) yang akan dilakukan. Adapun ruang lingkup yang akan diperiksa sesuai dengan kesepakatan antara penulis dengan pihak Bulog, maka ruang lingkup pemeriksaan manajemen mencakup fungsi pembelian dan penyaluran pangan Perum Bulog Divisi Regional NTB Di Mataram.

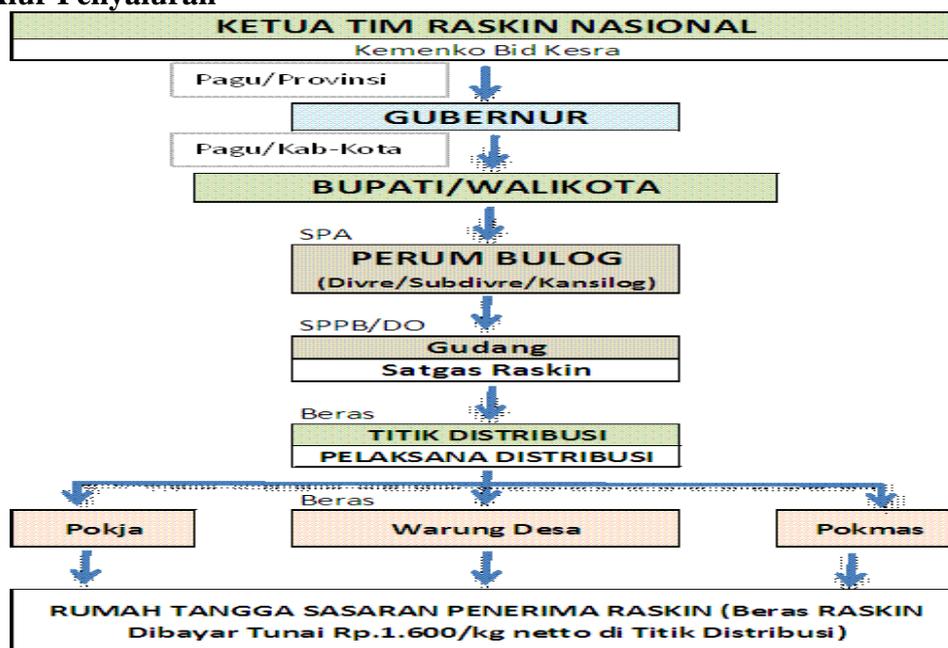
4.2 Mengumpulkan Fakta

Sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap fungsi pembelian dan penyaluran pangan, terlebih dahulu melalui tahap yang ada. Tahapan itu salah satunya adalah mengumpulkan informasi latar belakang atau tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini informasi yang dikumpulkan adalah berupa struktur organisasi, perencanaan pembelian dan penyaluran, dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembelian dan penyaluran, prosedur dan kebijakan-kebijakan, serta lain-lain yang berkaitan dengan fungsi pembelian dan penyaluran.

4.3 Alur Pembelian



4.4 Alur Penyaluran



4.5 Pengendalian Intern Fungsi Pembelian dan Penyaluran Pangan Pada Perum Bulog.

1. Pemeriksaan Sekilas

Adapun dokumen dan catatan yang digunakan dalam pengendalian intern fungsi pembelian dan penyaluran pangan pada Perum Bulog, antara lain :

- a. Kwitansi Dinas
- b. Surat perintah bayaran (SPP) khusus
- c. Laporan mingguan realisasi pengadaan gabah
- d. Rekap penerimaan atau pemasukan barang (GD1M)
- e. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)

2. Prosedur Fungsi Pembelian dan Penyaluran Pangan pada Perum Bulog.

Adapun prosedur pembelian dimana Pihak yang melakukan pembelian yaitu Mitra Kerja Ada DN yang sudah terseleksi pertama-tama mengajukan permohonan kontrak pembelian yang ditunjukkan kepada Divre. Sebelumnya permohonan kontrak tersebut harus mendapat persetujuan dulu dari bagian gudang dengan melihat besarnya jaminan yang diserahkan oleh mitra kerja pengadaan gabah. Setelah bagian gudang setuju, maka permohonan kontrak tersebut diserahkan ke Divre, dan Divre menyerahkan kembali permohonan kontrak tersebut ke mitra kerja. Setelah itu bagian Divre mengeluarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) sebanyak 3 rangkap. Rangkap 1, diberikan kepada mitra kerja, rangkap 2 diberikan kepada Divre, dan rangkap 3 diserahkan kepada bagian gudang. Bagian gudang juga menerbitkan surat perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) barang, yang dibuat rangkap 3. Rangkap 1 diberikan kepada mitra kerja, rangkap 2 diberikan kepada Divre, dan rangkap 3 diberikan ke bagian gudang. Setelah itu pembayaran harga gabah kepada mitra kerja yang dilakukan oleh Divre dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Kepada Bank pelaksana kredit Perum Bulog atas beban L/C, dan Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog sebagai Bank pelaksana kredit adalah BRI. Surat perintah pembayaran (SPP) ini dibuat 4 rangkap. 3 rangkap untuk mitra kerja ADA DN yaitu rangkap ke-1, rangkap ke-3, dan rangkap ke-4.. Rangkap ke-3 dan ke-4 setelah di kontrasign oleh Bank pelaksana kredit, maka

pembayaran rangkap ke-4 dikembalikan mitra kerja untuk arsip, sedangkan rangkap ke-3 dikembalikan oleh Bank pelaksana kredit ke Divre untuk perhitungan kredit Perum Bulog. Sedangkan rangkap ke-2 untuk Divre.

3. Flow Chart merupakan gambar yang menunjukkan arus dokumen (data) dalam suatu sistem. Flow chart dibuat dengan symbol-simbol tertentu yang berguna sebagai alat dokumentasi yang memberikan penjelasan tentang suatu sistem tersebut.

4.6 Penarikan Kriteria

Dari data-data dan uraian yang ada maka dapat ditarik mengenai kriteria yang digunakan. Dalam hal ini sumber kriteria yang digunakan bersumber dari data masa lalu dan data yang dapat diperbandingkan. Adapun kriteria yang digunakan adalah :

1. Rencana dan realisasi yang diperiksa diperbandingkan dengan tiap-tiap data analisa efektifitas dan efisiensi tiga tahun terakhir yaitu tahun rencana 2006 sampai dengan 2008 dan tahun realisasi mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2009, yaitu mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi untuk tahun rencana dan realisasi baik secara total maupun perjenis pangan yang dibeli maupun yang disalurkan.
2. Membandingkan sistem pembelian dan penyaluran, prosedur, catatan-catatan, laporan serta data lain pada tahun yang diperiksa apakah telah efektif dilakukan atau tidak.

4.7 Review dan Pengujian sistem Pengendalian Manajemen.

Dengan menggunakan alat analisa seperti flow chart, prosedur dan dilengkapi dengan kuesioner, maka dilakukan pengujian sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Perum Bulog Mataram dalam rangka melakukan pembelian dan penyaluran pangan.

Tabel 4.1 Perbandingan Tingkat Efisiensi Tahun Yang Diperiksa Dengan Tahun Tingkat Efisiensi 3 Tahun Sebelumnya.

No.	Tahun Rencana / Realisasi	Jenis Pangan	Tingkat efisiensi		Ket: 1. lebih efisien 2. Kurang Efisien	
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2006/2007	Gabah Beras	9.734,41	3.758,99	2	2
			6.439,74	7.574,04	2	1
2	2007/2008	Gabah Beras	3.758,99	4.138,68	2	2
			7.574,04	7.089,25	1	2
3	2008/2009	Gabah Beras	4.138,68	4.138,67	2	2
			7.089,25	6.595,64	2	2
4	2009/2010	Gabah Beras	4138,67	3.547,19		
			6595,64	6.454,76		

(Sumber data : Data sekunder Perum Bulog)

Keterangan :

1. Lebih Efisien: Apabila tngkat efisiensi pada rencana atau realisasi untuk tahun yang diperiksa lebih tinggi atau sama dengan tingkat efisiensi pada rencana atau realisasi tiga tahun sebelumnya.
2. Kurang efisien: Apabila tingkat efisiensi pada rencana atau realisasi untuk tahun yang diperiksa lebih rendah daripada tingkat efisiensi pada rencana atau realisasi tiga tahun sebelumnya.

Dari Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tingkat realisasi maupun rencana untuk setiap jenis pangan maupun keseluruhan menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data pembelian serta penyaluran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan operasional biaya pembelian dan penyaluran pangan pada Perum Bulog masih belum efisien, disebabkan pada Tahun 2007, 2008, dan 2009 sebagian besar tingkat efisiensi rencana lebih tinggi daripada tingkat efisiensi realisasi.
2. Pembelian yang dilakukan Perum Bulog pada Tahun 2007, 2008 dan 2009 dapat disimpulkan telah mencapai sasaran, dikarenakan rencana pembelian yang ditetapkan dapat terlaksana secara efektif, sementara rencana penyaluran yang masih belum terlaksana secara efektif, yang dikarenakan rencana penyaluran lebih tinggi dari pada realisasinya.
3. Biaya pembelian dan penyaluran yang terjadi mencapai target yang direncanakan, ini terlihat pada tingkat efektifitasnya bahwa realisasi biaya pembelian ataupun penyaluran lebih tinggi dibandingkan dengan rencana biaya pembelian maupun penyaluran.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan serta mengingat betapa pentingnya efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pembelian dan penyaluran pangan pada Perum Bulog Divre NTB di Mataram, maka dianjurkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan pembelian dan penyaluran pangan, Perum Bulog hendaknya memperhatikan dengan teliti dan terperinci, yang disertai dengan prediksi. Sehingga rencana yang dibuat dapat direalisasikan dengan tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas yang tinggi.
2. Hal yang sifatnya kualitatif seperti prosedur, catatan-catatan, dokumen dan laporan mengenai pembelian dan penyaluran pangan, hendaknya Perum Bulog membuatnya secara khusus dan terperinci, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengarsipannya baik sebagai prediksi maupun evaluasi dalam perencanaan pelaksanaan operasional ditahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *"Buku Auditing, Dasar2 Audit Laporan Keuangan. UUP STIM"*
- Agoes, Sukrisno. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alvin A. Arens, (2006). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*, Indeks, Jakarta.
- Amin Widjadja Tunggal. (2008). *Audit Manajemen : Rineka Cipta*, Jakarta.
- Arrens dan Loebbecke. (2009). *Auditing Suatu Pendapat Terpadu*, Salemba Empat.
- Boynton, Johnson, dan Kell. (2003). *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh, Erlangga.
- Gundodiyoto, Sanyoto. (2002). *Audit Sistem Informasi : Pendekatan Konsep*, PT. Media Global Education, Jakarta.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran*, Ed.11, Jilid I. Penerbit PT. Indeks : Jakarta.

- Kountur, Rony S. (2003). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. : CV. Taruna Grafika, Jakarta.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*, Buku I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman. (2003). *Human relation untuk Management (Teori dan Praktek)*: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Simamora, Henry. (2002) *Auditing*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah RI (2003/2004). *Pedoman Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan Giling Gabah*. Divisi Pengadaan Perum Bulog. Jakarta.
-(2003). *Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog*. Jakarta.
-(2009). *Pedoman Umum Raskin*, Divisi Pengadaan Perum Bulog. Jakarta.
-(2009). *Pedoman Umum Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri*, Keputusan Direksi Perum Bulog. Jakarta.